

Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi
Volume 2, Nomor 1, Maret 2018, 48-58

KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Rahmat Musfikar

Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
email: rahmat.musfikar@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aimed to know the obstacles in implementing E-government in Pidie district government. This study used previous studies, frameworks and theories to create a suitable new model in Pidie District. The methodology used in this study is a quantitative approach by using questionnaire distribution technique to government employees. The method for sampling used is nonprobability technique namely purposive sampling. Data analysis technique used in this research is Partial Least Square (PLS). The technique used to test the hypothesis statistically is bootstrapping on the PLS. The hypothesis proposed in the study is that there were 3 obstacles in implementing e-government in Pidie district government. The results of this study shows that the obstacles that greatly affected the implementation of e-government in Pidie government was the organizational factor, while the other two factors, Human Resources (HR) and the infrastructure factor, did not show a significant effect.

Keywords: *e-government, Government, Pidie, Partial Least Square, bootstrapping*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kendala dalam implementasi E-government pada Pemerintah kabupaten Pidie. Untuk mem-propose sebuah model baru pada penelitian ini adalah dengan cara menggabungkan, sintesis dan re-factor. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik penyebaran kuisioner kepada pegawai pemerintahan. Metode untuk pengambilan sampel yang di gunakan adalah teknik nonprobability yaitu *sampling purposive*. Teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian ini adalah *Partial Least Square (PLS)*. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis secara statistik adalah bootstrapping pada PLS. Hipotesis yang di usulkan dalam penelitian mempunyai 3 kendala dalam mengimplementasikan e-government pada pemerintah kabupaten pidie. Hasil dari penelitian ini kendala yang sangat mempengaruhi implementasi e-government pada pemerintah Pidie adalah faktor organisasi, sedangkan dua faktor lain yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor infrastuktur tidak mempengaruhi signifikan.

Kata Kunci: *e-government, pemerintah, pidie, Partial Least Square, bootstrapping*

1. Pendahuluan

Dewasa ini merupakan dewasa teknologi, dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia semakin berkembang dengan pesat. Teknologi dan informasi dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari hari, sehingga produktivitas kerja meningkat. Teknologi informasi dan komunikasi merambak ke semua

KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

sektor. Sektor yang berdampak teknologi informasi yang sangat berdampak adalah sektor Pemerintahan.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini, pemerintah Sebagai lembaga resmi Negara yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan penggunaan teknologi dan informasi secara menyeluruh di semua lapisan masyarakat termasuk di pemerintahan. Program pemerintah untuk mewujudkan penerapan teknologi informasi adalah E-government. Penerapan E-government ini dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah departemen maupun instansi di bawah departemen. Penerapan E-government di Indonesia sudah mulai berkembang dan sudah ada peraturan serta undang-undang tentang E-government dari pemerintah Indonesia.

Peraturan Penerapan E-Government di Indonesia adalah pada Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government di Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003. Dalam Inpres tersebut tujuan penerapan E-Government di Indonesia adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien[1]. Penerapan E-government juga diterapkan di Provinsi Aceh. Salah satu daerah di Aceh yang sudah baik dalam penerapan E-government adalah kabupaten Pidie.

Rumusan Masalah

Dalam penerapan suatu program E-Government banyak kesulitan dihadapi oleh Pemerintah baik Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat yang menangani adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, sedangkan pada pemerintah Daerah kebanyakan ditangani langsung oleh Bupati atau Walikota. Dalam proses evaluasi implementasi E-government di Indonesia, Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia melalui program Peningkatan E-government Indonesia (PeGI) pada tahun 2011. Dari hasil evaluasi tersebut Kabupaten Pidie merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat penilaian kategori kurang atau merah pada seluruh dimensi yang dinilai. Berdasarkan hasil tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini “apa kesulitan menjalankan Pemerintahan melalui E-government pada Pemerintah kabupaten Pidie?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi E-government serta kendala apa saja dalam implementasi E-government pada Pemerintah kabupaten Pidie. Penelitian ini juga untuk mengetahui Strategi apa yang sesuai untuk memberi solusi permasalahan yang terjadi terhadap kendala implementasi E-Government.

2. Kajian Pustaka

Salah satu penelitian yang sejenis dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rakhmanov di negara Uzbekistan pada tahun 2009 dalam paper nya “The barriers affecting E-government development in Uzbekistan”. Ada beberapa kendala dalam penerapan e-government di suatu pemerintahan atau tempat, yang pertama adalah pembiayaan penerapan dan pengembangan e-government yang tergolong tinggi. Kendala kedua dalam penerapan E-Government adalah sumber daya manusia, kurang sumber daya

manusia yang menguasai bidang IT dalam penerapan e-government menjadi hambatan terbesar dikarenakan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan sistem e-government.

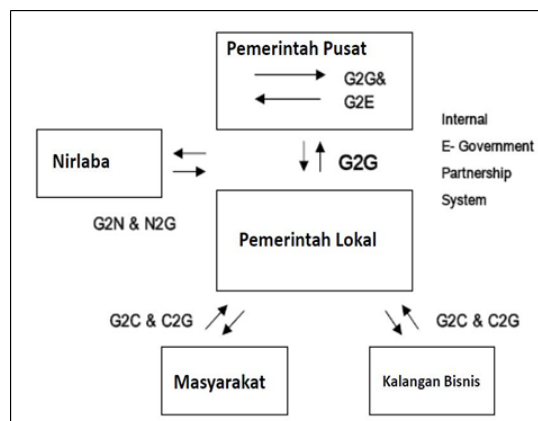
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Altameem, Torki, pada tahun 2006, Altameem, Torki pada penelitiannya mempropose sebuah model kesuksesan untuk menerapkan e-government dengan judul Critical Success Factors of E-government: A Proposed Model for E-government Implementation. Dalam penelitian tersebut disebut beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam penerapan e-government dalam satu daerah, Faktor Faktor adalah Tata Kelola Pemerintahan, Tersedianya Infrastuktur IT dan Organisasi[3].

Penelitian lain dilakukan di Indonesia oleh Nurul Faizah(2009) [17] dengan judul penelitian” Faktor Faktor Sukses Implementasi E-government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia” yang menghasilkan 18 Faktor yang mempengaruhi penerapan e-Government di kota tau kabupaten di Indonesia, yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Perencanaan, Infrastuktur, Aplikasi, Kepemimpinan, Pelayan Publik, Kolaborasi, Proses Perubahan, Investasi, Dorongan Agen Perubahan, Manajemen Proyek, Manajemen Perubahan, Hukum dan Peraturan, Integrasi E-government ke Dalam Tata kelola Pemerintah, dan Isu Keamanan. Metode Penelitian ini menggunakan Wawancara dan Fokus Grup Discussion (FGD), dan Konfirmasi dengan Ahli [17].

E-Government

Banyak definisini yang di paparkan oleh peneliti tentang E-government. Salah satu dari definisi oleh Moreover, yang merupakan the United Nations Division for Public Economics and Public Administration pada tahun 2001 bahwa,” E-governmentas menggunakan internet dan world wide web untuk memberikan informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, bisnis dan instansi pemerintah lainnya” [3].[5] Definisi lain di kemukan oleh Deloitte Research pada tahun 2000 bahwa :”E-government adalah sebagai penggunaan TIK, khususnya internet, sebagai alat untuk memberikan pelayanan pemerintah yang lebih baik kepada warga, bisnis dan karyawan” [3].[7]

Model E-government adalah model interaksi antara stakeholder stakeholder dengan pemerintah melalui elektronik atau teknologi informasi. Ada delapan model E-government yang di jelas oleh [4], Model E-government interaksi antara stakeholder dengan pemerintah pada gambar 1.



Gambar 1 Model E-Government

KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Kesuksesan E-government

Dalam Inpres 2003 menyebutkan bahwa ada 5 faktor kesuksesan atau kesiapan dalam mengimplementasi E-government pada pemerintahan yaitu E-Leadership merupakan faktor yang menjelaskan aspek aspek yang berhubungan dengan kesiapan dan inisiatif dari Negara, faktor Infrastruktur jaringan informasi termasuk kecepatan akses internet, biaya penggunaan jasa internet dan termasuk juga dengan tempat penggunaan internet untuk umum serta kualitas dan jangkauan koneksi. Faktor ketiga adalah Pengelolaan informasi berupa sumber informasi, kualitas informasi serta keamanan informasi, cara pengolahan dan tempat penyimpanan informasi, dan sampai dengan cara menyalur dan mendistribusikan informasi. Faktor keempat adalah Lingkungan bisnis merupakan hubungan informasi tentang bisnis dan ekonomi antara pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah dan terakhir adalah faktor Masyarakat dan sumber daya manusia yang merupakan faktor berhubungan dengan penggunaan layanan teknologi informasi oleh masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk menggunakan layanan teknologi informasi.

Kendala Implementasi E-Government

Dalam implementasi E-Government dalam penelitian Elyor Rakhmanov [6] ada beberapa faktor penghambat penerapan E-government di Negara berkembang seperti Uzbekistan di tinjau dalam segi kesiapan badan pemerintahan, mekanisme teknologi informasi serta hubungan antara penyelenggara E-government dan pihak yang lain adalah Legislatif dan hukum suatu daerah atau pemerintah tentang penerapan E-Government, administratif yang merupakan faktor penghambat penerapan E-government adalah tingginya biaya pengembangan perangkat lunak dan lisensinya, infrastruktur, dan pelatihan terhadap pekerja di bagian layanan IT. Ketiga kendala penerapan e-government adalah aspek teknologi adalah koneksi internet yang sangat lambat, dengan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menerapkan E-government di wilayah tersebut. Budaya dari pengguna juga menjadi faktor hambatan dalam penerapan E-government di suatu daerah. Dengan adanya budaya pengguna yang biasanya menggunakan manual, sehingga susah untuk merubah budaya tersebut menjadi menggunakan digital.

Ada juga beberapa faktor yang menghambat penerapan E-government ditinjau dari sisi penerapan E-government secara online, baik layanan, informasi dan database adalah seperti yang di jelaskan oleh Xu Wanhua dan Zhou Guoping [7] adalah sebagai berikut[12] : 1. Infrastruktur, 2. Hukum dan Undang Undang, 3. Integrasi E-government, 4. Isu keamanan.

Pemeringkat E-government Indonesia (PeGI)

PeGI merupakan kegiatan yang di adakan oleh Direktorat E-government di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. PeGI diadakan untuk mengukur penerapan E-government di lingkungan pemerintahan, baik yang di pusat maupun di daerah. Tujuan dari PeGI ini adalah seperti yang disebutkan pada website PeGI sebagai acuan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan, sebagai evaluasi untuk memberi dorongan ke pemerintah dalam penerapan TIK, dan sebagai peta penerapan dan pemanfaatan TIK secara nasional. Ada lima dimensi yang dinilai dalam PeGI yaitu : Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini mencari hubungan pengaru antara variabel variabel. Tujuan menggunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk menguji teori teori dan penelitian penelitian terdahulu pada tempat lain. Menurut [18] sugiono untuk menguji teori lebih cocok menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan data dilakukan dengan cara pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah teknik nonprobability sampling. Jenis teknik pengampilan sampel yang digunakan pada nonprobability adalah sampling purposive.

Penelitian ini sampel di ambil pada dinas atau instansi yang sudah menerapkan e-government yaitu di sekretariat daerah, sekretariat DPRK, Bappeda, dinas kominfo dan dinas Pendidikan Pidie atau pada satuan kerja pemerintah yang terkait. Pada penelitian ini jumlah sampel yang di ambil adalah sebanyak 5-8 responden dari setiap instansi pemerintah atau satuan kerja perangkat kabupaten yang menjadi tempat ambil sampel.

Pengolaan data pada penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan aplikasi smart PLS. Program ini dapat digunakan untuk menganalisis component-based SEM atau variance-based SEM. Pengolahan data di dalam program Smart PLS terdiri dari evaluasi model pengukuran (outer model), evaluasi model struktural (inner model), pengujian hipotesis, serta quality indexes model.

Pada Program Smart PLS untuk menguji validitas sebuah indicator pada variabel dengan melihat nilai loading factor untuk setiap indikator konstruk. Nilai dari loading factor harus melebihi 0.7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory, sedangkan untuk penelitian yang bersifat exploratory. Pengujian reabilitas dilakukan dengan melihat nilai cronbach's alpha. Nilai cronbach's alpha adalah lebih besar dari 0.7 untuk confirmatory research dan 0.6-0.7 untuk exploratory research.

Evaluasi Model penelitian adalah Teknik yang di gunakan untuk analisa model penelitian adalah teknik Evaluasi model structural. Tujuan dari menggunakan teknik Evaluasi Model Structural adalah untuk melihat kuat atau lemahnya sebuah model penelitian. Validasi terhadap model struktural dalam Smart PLS dapat dilakukan berdasarkan nilai R-Square (R^2), effect size (f^2), maupun predictive relevance (Q^2) yang diperoleh dari Latan dan Ghozali (2012). Pada penelitian ini untuk melihat Model Strukturalnya hanya menggunakan nilai R^2 . Perubahan nilai R^2 dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

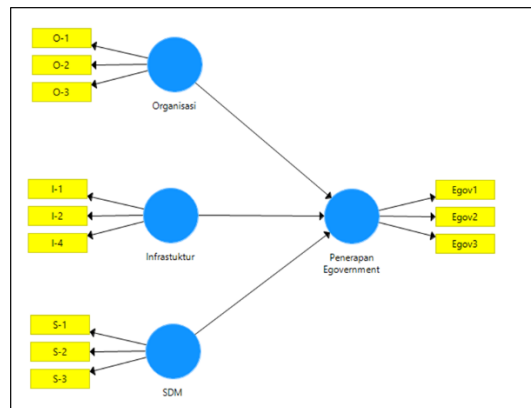
Pada pengujian hipotesis dengan Smart PLS dengan cara evaluasi model dilakukan dengan menggunakan prosedur jackknifing atau bootstrapping. Nilai signifikansi two-tailed yang digunakan (t-value) adalah 1.65 untuk level signifikansi 10%, 1.96 untuk level signifikansi 5%, dan 2.58 untuk level signifikansi 1%. Level signifikansi yang digunakan oleh penulis adalah 5%, sehingga t-value yang diambil sebagai acuan parameter adalah 1.96.

4. Pembahasan

Pada penelitian ini untuk membuat model penelitian dengan menggunakan toll adalah aplikasi Smart PLS. Cara penggunaan aplikasi Smart PLS dengan cara memasukan semua variabel laten dan indikatornya dengan cara menghubungkan variabel laten lain dan berserta indikatornya juga berdasarkan penelitian yang terdahulu (Heng W. dan Jinchan H., 2010). Data penelitian ini adalah data hasil kuisioner yang kembali dari

KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

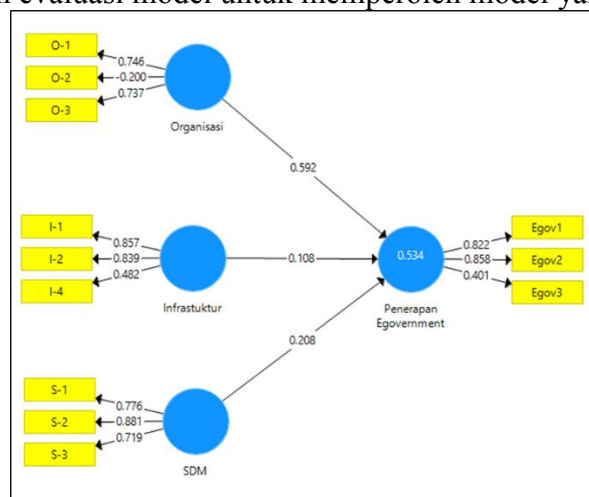
responden yang valid adalah tidak item pernyataan yang kosong atau tidak terisi oleh responden (*missing value*), sehingga pada pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Smart PLS langsung dilakukan dan jalankan tanpa menggunakan prosedur untuk mengatasi *missing value*. Model Penelitian yang dibuat dalam penelitian ini dengan menggunakan aplikasi Smart PLS dapat dilihat pada gambar 3



Gambar 2. Model Penelitian Awal Sebelum Evaluasi

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) Validasi Konvergen

Pengujian loading factor adalah pengujian validasi convergen dengan nilai harus lebih besar dari 0.7 untuk penelitian bersifat *confirmatory*. Setelah modelnya dibuat seperti gambar 4.1, maka peneliti akan melakukan running program berdasarkan algoritma PLS untuk melihat nilai loading factor dari setiap variabel variabel dan indikator indikator yang terhubung. Hasil running program dengan algoritma PLS dapat dilihat pada gambar 3 yaitu output merupakan nilai nilai loading factor setiap indikator indikator yang terhubung dengan variabel variabel laten. Nilai loading factor harus lebih besar dari 0.7 yang dinyatakan valid. Maka bila ada nilai loading factor yang dibawah 0.7 maka akan dilakukan evaluasi model untuk memperoleh model yang lebih baik.

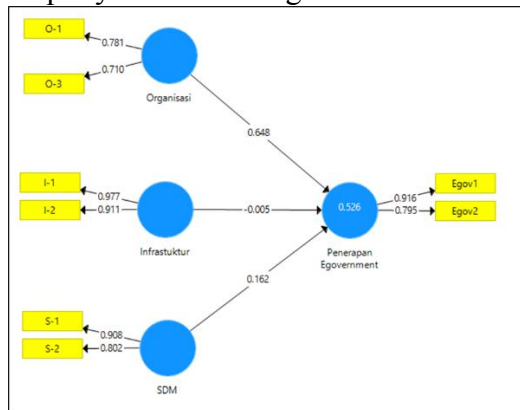


Gambar 3 Model Awal Setelah dijalan dengan Algoritma PLS

RAHMAT MUSFIKAR

Dari hasil running program dengan algoritma PLS yang ada pada gambar 4.2 masih terdapat nilai loading factor dari beberapa indikator yang terhubung dengan variabel laten masih dibawah 0.7, sehingga penulis akan melakukan evaluasi model terhadap indikator indikator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0.7. adapun indikator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0.7 yaitu Egov3 = 0.401, I-4 = 0.482, dan O-2 = -0.200.

Tahap selajutnya adalah penghapusan indikator yang nilai loading factornya dibawah 0.7. penghapusan dilakukan dengan cara menghapus indikator yang nilai loading factor terkecil bila terdapat lebih dari satu indikator yang nilai loading factornya dibawah 0.7 pada variabel laten yang sama. Dan apabila pada variabel laten terdapat hanya satu indikator yang nilai loading factornya dibawah 0.7, maka akan hapus indikator yang nilainya dibawah 0.7 saja. Apabila variabel laten tidak mempunyai indikator yang dibawah 0.7. Setelah penghapusan indikator yang nilainya dibawah 0.7 pada model yang sudah dibuat, selanjut akan menjalankan kembali Algoritma PLS sehingga tidak ada lagi indikator yang terhubung dengan variabel laten yang mempunyai nilai loading factornya dibawah 0.7 (< 0.7). Penghapusan indikator yang nilai loading factornya dibawah 0.7 pada penelitian ini sebanyak 2 tahap. Sehingga menghasilkan semua nilai loading factornya diatas 0.7. Tahap terakhir evaluasi bahwa tidak ada indikator yang terhubung dengan variabel laten mempunyai nilai loading factor dibawah 0.7, seperti pada gambar 4



Gambar 4 Hasil Evaluasi Tahap akhir

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) Pengujian Realibilitas

Pengujian reabilitas dilakukan dengan melihat nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Pembagian katagori nilai *cronbach's alpha* Menurut Hilton dan Brownlow (2004) dapat dibagikan nilai dari *cronbach's alpha* dalam 4 kategori. Hasil penelitian nilai *cronbach's alpha*. Variabel Organisasi yang nilai *cronbach's alpha*nya 0.206 berkatagori rendah, Penerapan E-Government 0.654 dan Sumber Daya Manusia (SDM) 0.647 berkatagori moderat dan Variabel Infrastuktur memiliki nilai *cronbach's alpha* tergolong tinggi yaitu = 0.891. Berdasarkan hasil yang dijalankan pada program smart PLS dapat dilihat nilai *composite reliability* setiap variabel adalah Organisasi 0.715, Infrastuktur 0.943, Sumber Daya Manusia (SDM) 0.846, Penerapan E-Government 0.847. semua variabel memiliki nilai *composite reliability* diatas 0.7, maka Realibilitasnya valid.

Evaluasi Model Sturktural (Inner Model)

Hasil pengujian menggunakan smart PLS nilai *R-Square* (R^2) yaitu 0.526 yang menunjukan bahwa model penelitian ini termasuk model yang moderat. Pengujian Nilai *Effect Size* (f^2) dilakukan dengan cara menghitung dengan menggunakan rumus

KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

$$f^2 = \frac{R_{include}^2 - R_{exclude}^2}{1 - R_{include}^2} \quad (1)$$

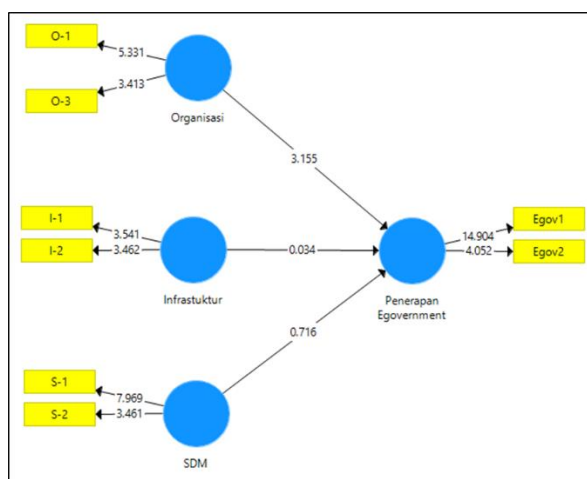
Hasil perhitungan *Effect Size* (f^2) dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Hasil Perhitungan *Effect Size* (f^2)

No	Variabel	f2	Kategori Effect
1	Organisasi	0.736	Di atas 0.35
2	Infrastuktur	0.000	Di bawah 0.02
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	0.033	Di bawah 0.035

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dengan cara bootstrapping pada smart PLS. Setelah bootstrapping berhasil dijalankan, hasil output dari T-Statistics yang menunjukkan signifikansi variabel. Pada penelitian ini penulis menggunakan tingkat signifikasinya menggunakan 5% ($\alpha = 0.05$). Adapun nilai yang dalam t-tabel karena menggunakan α 5% adalah 1.96. Pada penelitian ini uji hipotesis dengan menggunakan menguji t-value dari hasil di jalankan smart PLS dengan nilai t-table (1.96). Pada buku (Hengky L . dan Imam G., 2012) menyatakan apabila t-value variable lebih besar dari t-value table (1.96) maka hipotesis diterima. Adapun gambar hasil dari bootstrapping model penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5 dan hasil dari stastitik berupa nilai signifikan dapat dilihat pada tabel 2.



Gambar 5 Hasil bootstrapping Model Penelitian

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis

No	Variabel	Original Sample (O)	T Statistics ((O/STERR))	Keterangan
1	Organisai ->Penerapan E-Government	0.648	3.155	Hipotesis Diterima
2	Infrastuktur -> Penerapan E-Government	-0.005	0.152	Hipotesis Ditolak
3	Sumber Daya Manusia (SDM) -> E-Government	0.162	0.716	Hipotesis Ditolak

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa ada 1 hipotesis yang diterima dari 3 hipotesis, sedangkan 2 hipotesis lagi ditolak. Maka dapat disimpulkan sekitar 33.33% hipotesis yang diterima. Dari hasil uji hipotesis tersebut dapat dilihat bahwa faktor organisasi mempengaruhi implementasi e-government pada Pemerintah kabupaten Pidie. Dari hasil tersebut satu faktor yang mempunyai signifikan atau mempengaruhi terhadap hambatan implementasi e-government pada Pemerintah Kabupaten Pidie yaitu faktor organisasi dengan nilai T adalah 3.155. nilai tersebut menunjukan bahwa nilai T hasil di atas T tabel 1.96. Faktor organisasi mempunyai nilai original sample adalah 0.648, yang berarti hanya 0.648 mempengaruhi implementasi e-government dari faktor organisasi pada Pemerintah Kabupaten Pidie

5. Kesimpulan

Dari hasil analisis hipotesis, diketahui bahwa hanya ada 3 hipotesis yang diterima sehingga variabel yang ditolak sebanyak 21 tidak dimasukkan kedalam model. Hal ini berarti, bahwa setelah dilakukan proses pengolahan data dengan smart PLS model penelitian ini mengalami perubahan. Model akhir untuk penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.17. Untuk melihat berapa persentase pengaruh 3 variabel yang diterima dalam penelitian ini dengan cara melihat nilai R Square yaitu 0.3300, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh ketiga faktor yaitu Skill dan Keahlian IT, Integrasi E-government dan Harga Teknologi hanya 33% dan selebihnya yaitu 67 % lagi dipengaruhi oleh faktor yang lain..

Daftar Pustaka

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia. “ *Intruksi President Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Indonesia*”. 2003.
- [2] Indonesia Governance Index.”Indonesia Governance Index 2012 (“Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi”)”. Jakarta : The Partnership for Governance Reform (Kemitraan). .2013.
- [3] Alshehril, Mohammed; dan Drew, Steve J.” E-government principles: implementation, advantages and challenges”. Queensland :Inderscience Enterprises Ltd. .2007
- [4] Lee, Nag Yeon.(2013). Modul 3: Penerapan e-Government. Academy Modules (Bahasa Version).United nation : Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT). Access on 5 Desember 2013.<http://www.unapcict.org/academy/academy/academy-modules/bahasa-indonesia-version>
- [5] Pemerintah Indonesia, Direktorat E-government, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.”Pemeringkatan E-government Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2011”. Indonesia : Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.2011
- [6] Pemeringkatan e-government Indonesia.(2013). Tentang Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI).Jakarta : kementerian Komunikasi dan Informatika. Access on 10 Desember 2013. <http://pegilayanan.go.id/tentang-pegil>
- [7] Rakhmanov, Rakhmanov. “The barriers affecting E-government development in Uzbekistan”. South Korea : Seoul National University. Fourth International

KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

- Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology. 978-0-7695-3896-9/09. (2009).
- [8] Avison, D; dan Fitzgerald, Guy. "Information System Development". Singapore: Mc Graw Hill.2006
- [9] Gates, Linda Parker. "Strategic Planning with Critical Success Factors and Future Scenarios: An Integrated Strategic Planning Framework". Hanscom : Carnegie Mellon University.2010
- [10] Esteves de Sousa, José Manuel. "Definition and Analysis of Critical Success Factors for ERP Implementation Projects". Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya
- [11] Wanhua, Xu; Guoping, Zhou. "The Development Of E-government In China : Challenges and The Future". Wuhan : Hubei University of Economics. IEEE. 978-1-4244-2108-4/08. 2008
- [12] Altameem, Torki; Zairi, Mohamed; Alshaw, Sarmad. "Critical Success Factors of E-government: A Proposed Model for E-government Implementation". London : Brunel University. IEEE. 1-4244-0674-9/06. 2006
- [13] Furuho, Bjorn; dan Wahid, Fathul. "E-government Challenges and the Role of Political Leadership in Indonesia: the Case of Sragen". Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Science, 2008. IEEE. 1530-1605/08. 2008
- [14] Kim, Young-Sik; Pokhare, Manish; dan Lee, Byung-Seub."E-government Implementation Strategy in Least Developed Countries: A Nepalese Case". Goyang City : Korea Aerospace University. ICEGOV2007, December 10-13, 2007, Macao. ACM 978-1-59593-822 -0/07/12. 2007
- [15] Ningsih, Yulia Razila." Faktor Faktor Penghambat E-government: Studi kasus Pemerintah Provinsi Riau". Jakarta : Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi.2013
- [16] Novita,Dien."Faktor Faktor Penghambat Pengembangan E-government: Studi kasus Pemerintah Kota Palembang Sumatera Selatan". Jakarta : Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi.2011
- [17] Faizah, Nurul." Faktor Faktor Sukses Implementasi E-government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia". Jakarta : Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi.2009
- [18] Sugiyono."Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)". Bandung : Alfabeta.2013
- [19] Sarwono, Jonathan."Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)".Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.2012
- [20] Hasibuan, Zainal A." Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi". Depok : Universitas Indonesia.2007
- [21] A. Somantri; dan S. A. Muhidin."Aplikasi Statistika Dalam Penelitian". Bandung: Pustaka Setia.2006
- [22] Gulati ,Girish J.; "Jeff"; Yates, David J.; dan Williams, Christine B. "Understanding the Impact of Political Structure, Governance and Public Policy on E-government". Massachusetts : Bentley University. 45th Hawaii International Conference on System Sciences. DOI 10.1109/HICSS.2012.617. IEEE. 978-0-7695-4525-7/12. 2012

RAHMAT MUSFIKAR

- [23] Wang, Heng; dan Hou, Jinchang.”The External and Internal Barriers to E-government Implementation”. China : Shandong University of Finance. IEEE. 978-1-4244-5326-9/10. 2010
- [24] Latan, Hengky; dan Ghozali, Imam. “Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3”.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012